PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

UNIT KERJA : **UNIVERSITAS INDONESIA**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TITO LATIF INDRA**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **912528**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN — Rp. 12.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 111 m2/110 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/88 m2 di KAB / KOTA KOTA SUKABUMI , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/145 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.700.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/170 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/275 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 5.665 m2/5.665 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 6.085 m2/6.085 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN — Rp. 468.000.000

1. MOBIL, MERCEDES BENZ C 200 CGI AT Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000

3. MOBIL, TOYOTA FORTUNER 2.5 G A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
4. MOTOR, HONDA REVO NF11T11CO1 MT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C.	**HARTA BERGERAK LAINNYA**	**Rp.**	**165.550.000**
D.	**SURAT BERHARGA**	**Rp.**	**----**
E.	**KAS DAN SETARA KAS**	**Rp.**	**34.741.076**
F.	**HARTA LAINNYA**	**Rp.**	**----**
	Sub Total	**Rp.**	**12.668.291.076**
III.	**HUTANG**	**Rp.**	**1.964.852.111**
IV.	**TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**	**Rp.**	**10.703.438.965**

Catatan:
1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.